

Job Fair di Thamrin City Minggu Depan Diikuti 40 Perusahaan

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Pusat akan menggelar pameran bursa kerja atau Job Fair yang diikuti 40 perusahaan. Job Fair ini bakal dilaksanakan di Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Event Job Fair akan digelar mulai 8 dan 9 Agustus 2022 di Thamrin City. Kemungkinan akan membuka ribuan lowongan kerja," kata Kepala Sudin Nakertransgi Jakarta Pusat, Sudrajad, Rabu (3/8).

Program bursa kerja ini akan diikuti 40 perusahaan yang tengah membuka lowongan pekerjaan. Suku Dinas Tenaga Kerja juga akan menggelar bazar Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Jakpreneur binaannya pada kegiatan itu.

Sudrajad mengatakan pameran bursa kerja ini bertujuan untuk memfasilitasi atau mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Selain itu, kata dia, warga yang ingin mencari lowongan pekerjaan di pameran bursa kerja harus mendaftarkan diri melalui akun Instagram @festivalnyarikerja.

"Ayo, warga Jakarta Pusat yang ingin mencari lowongan

kerja segera daftarkan diri melalui akun Instagram @festivalnyarikerja yang akan diselenggarakan mulai 8 sampai 9 Agustus 2022 di Thamrin City," ujarnya.

Kemarin, Dinas Tenaga Kerja DKI juga telah menggelar bursa kerja di Mall Season City, yang langsung diserbu hingga 10 ribu orang. Mereka sudah antri ketika bursa kerja belum juga dibuka pada Selasa pagi.

"Target hari ini 3.000 peserta, tetapi yang datang mencapai 10.000 peserta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/8).

Andri menjelaskan mereka yang datang ke bursa kerja ini tidak hanya Jakarta, tapi juga luar wilayah Ibu Kota. Menurut Andri, dalam job fair di Mall Season City ini bekerja sama dengan 40 perusahaan yang berada di wilayah Jakarta Barat untuk menyediakan lowongan kerja.

Perusahaan yang ikut bursa kerja ini bergerak di bidang retail hingga teknologi. Setiap perusahaan diperkirakan bisa menyerap 100 hingga 200 tenaga kerja dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana. Karenanya, bursa kerja ini diperkirakan bisa menyerap 5.000 tenaga kerja. ● yan

Transjakarta Buka 1.801 Lowongan Petugas Layanan

JAKARTA (IM) - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka lowongan kerja dengan melakukan penambahan sebanyak 1.801 karyawan untuk ditempatkan sebagai Petugas Layanan Operasi (PLO). Proses perekrutan dilakukan antara 2-7 Agustus 2022.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor mengatakan pengadaan posisi PLO akan ditambah. Langkah itu merupakan upaya Transjakarta untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan pelanggan.

"Ini salah satu upaya penting yang kami lakukan untuk memastikan kenyamanan dan kenyamanan pelanggan berjalan dengan baik," ujar Anang di Jakarta, Rabu (3/8).

Pengadaan PLO juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Transjakarta dalam meminimalisasi tindakan pelecehan seksual di transportasi publik. Keberadaan petugas di dalam

bus diharapkan bisa membantu mencegah serta bergerak cepat menangani apabila diketahui ada yang tidak diinginkan terjadi.

"Petugas kami siap membantu apabila pelanggan merasa ada gangguan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Kami mengimbau pelanggan bisa melaporkan agar bisa ditindaklanjuti," katanya.

Penambahan karyawan itu disebutkan sebagai respons Transjakarta terhadap aspirasi pelanggan yang mengharapkan pelayanan diperkuat, selain dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Kualifikasi dasar yang perlu dipenuhi adalah mempunyai pendidikan minimal SMA/ sederajat, sehat jasmani, maupun rohani. Proses perekrutan ini tidak dipungut biaya atau gratis.

Proses pendaftaran bisa dilihat di website Transjakarta yang bisa diakses melalui link PT Transportasi Jakarta - SMART Mobility for SMART City. ● yan

Disdik DKI Pastikan tak Ada Kewajiban Siswi Pakai Jilbab

JAKARTA (IM) - Kepala Sub Bagian Humas Kerja Sama Antar Lembaga Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Radja Gah angkat suara terkait kasus 2 siswi SD dan SMP di Jakarta dipaksa memakai jilbab oleh gurunya. Ia menegaskan tidak ada kewajiban memakai jilbab di sekolah negeri. Taga mengatakan penggunaan seragam di sekolah sudah ada aturannya. Aturan ini tertuang dalam Kepgub 2292 Tahun 2015 dan Pergub No. 178 Tahun 2014.

Menurut Taga, penggunaan jilbab bagi siswi disesuaikan dengan tingkat keyakinannya. Aturan tentang seragam sekolah tersebut juga telah diatur oleh Dinas Pendidikan. "Ada aturan Kepgub 2292 tahun 2015 itu tentang penggunaan pakaian di sekolah," ucapnya.

"Di pergubnya itu ada diatur jika ingin menggunakan jilbab silakan, kalau tidak juga silakan. Artinya di sekolah negeri itu aturannya tidak berdasarkan suatu agama," tukasnya.

Setelah peristiwa ini, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengimbau seluruh sekolah agar tidak ada pemaksaan dalam penggunaan seragam sekolah karena sudah ada aturannya.

Sebelumnya, ada laporan pemaksaan penggunaan jilbab kepada seorang siswi SD negeri di Jakarta Barat dan seorang siswi di SMP negeri di Jakarta Selatan. Kedua siswi merasa tertekan akibat ditegur tidak memakai jilbab. Siswi tersebut merasa disudutkan karena guru menegur di depan murid lainnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



PEMBANGUNAN KAMPUNG GEMBIRA EKS KORBAN KEBAKARAN

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah-rumah di Kampung Gembira, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta, Rabu (3/8). Berdasarkan data pemerintah setempat per 1 Agustus 2022, kemajuan revitalisasi permukiman korban kebakaran mencapai 50 persen.

Pemprov DKI akan Tarik Denda Pajak Kendaraan Belum Uji Emisi

Saat ini rencana itu tengah diformulasikan lebih jauh bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Dinas Perhubungan, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan pihaknya akan memberikan denda atau pajak bagi kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi. Menurutnya, hal itu juga akan berlaku pada pemilik dengan usia kendaraan lebih dari tiga tahun.

"Jika tidak lulus uji emisi

dan atau belum melakukan uji emisi dikenakan denda pajak. Koefisien dendanya saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian dan Kemenkeu," kata Asep dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/8).

Dia menambahkan, wacana itu berdasarkan pada pemenuhan baku mutu hasil uji

emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikatakan dia, akan menerapkan ketentuan ini mulai Desember 2022.

Meski demikian, Asep menambahkan, saat ini rencana itu tengah diformulasikan lebih jauh bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Polda Metro Jaya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, dan Dinas Perhubungan.

Menurut Asep, dasar hukum kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 206 Ayat 2 (a) yang mengatur bahwa pemenuhan uji emisi diterapkan pada alat transportasi

darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun dan Pasal 531 poin f bahwa pemenuhan baku mutu hasil uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk unsur pencemar lingkungan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Asep mengatakan, keten-

tuhan untuk memperketat uji emisi bagi semua kendaraan pribadi merupakan arahan dari Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Terlebih, dijelaskan dia bahwa sumber polusi terbesar di DKI Jakarta bersumber dari sektor bergerak.

"Yaitu kendaraan bermotor atau transportasi darat," ujar dia. ● yan

Anies: Imunisasi Sangat Penting untuk Tumbuh Kembang Anak

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terus mendorong para orang tua khususnya di Jakarta, agar bertanggung jawab dalam imunisasi anak-anaknya. Hal itu, sesuai dengan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang berlangsung pada bulan Agustus 2022.

Anies mengatakan, Imunisasi sangat penting untuk melindungi tumbuh kembang anak. Sehingga, lanjut Anies, orang tua memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mendorong buah hatinya melakukan imunisasi.

"Kami mengajak seluruh orang tua untuk ambil tanggung jawab melindungi anak-anak. Bagi orang tua penting untuk melindungi anak-anak yang kita cintai. Jangan biarkan anak-anak berinteraksi dengan lingkungan tanpa terdapat imunisasi," ujar Anies di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8).

Lebih lanjut, Anies menuturkan, sikap tanggung jawab dan kepedulian tersebut semestinya tidak hanya berlaku bagi anak sendiri. Namun, kata Anies, perlu adanya kepedulian bagi anak-anak yang kerap dijumpai baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

"Seluruh anak-anak, bukan hanya anak-anak kita tetapi

keponakan dan lainnya. Tanamkan sudahkah mengambil kesempatan (melengkapi status imunisasi), kalau belum ajak untuk mereka imunisasi, tambahkan campak rubella," ungkapnya.

"Kami sering mengimbau ketika kita melihat ada anak-anak, pandanglah mereka sebagai anak kita," sambung Anies menambahkan.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengejar target imunisasi anak usia 9-59 bulan sebanyak 715.782 anak selama Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang berlangsung selama Agustus, 2022.

Langkah tersebut ditargetkan agar ketahanan tubuh para anak di DKI Jakarta meningkat dan terhindar dari penyakit.

"Sasarannya adalah balita 9 bulan sampai 59 bulan dengan sasaran balita 715.782 anak," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widayastuti dalam paparnya di depan gedung RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (3/8).

Widayastuti menjelaskan, target tersebut sengaja dikejar guna memastikan seluruh anak di DKI mendapatkan imunisasi sehingga ketahanan tubuh pun meningkat. Terutama untuk mengantisipasi penyakit Rubella. ● yan

Petugas Razia PKL yang Kuasai Trotoar di Jalan Stasiun Senen

JAKARTA (IM) - Petugas gabungan yang terdiri Satpol PP Jakarta Pusat (Jakpus) dan Kecamatan Senen menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar kawasan Taman HKS dan Jalan Stasiun Senen, Kelurahan Senen.

Razia tersebut dilakukan untuk pengawasan dan pengendalian ketertarikan serta ketertiban umum yang berkaitan dengan fasilitas trotoar.

"Hampir 70 pedagang yang gunakan trotoar ditertibkan. Kami amankan sampah bambu dan gerobak yang tidak terpakai serta ditinggal pemiliknya, itu kita amankan," kata Kepala Seksi Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jakpus, Gatra Pratama Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/8).

Gatra menjelaskan, setidaknya 100 pedagang gabungan dikerahkan untuk menertibkan gerobak dan lapak pedagang yang berjualan di atas trotoar. Petugas juga memberikan pemahaman kepada pedagang bahwa trotoar adalah fasilitas umum untuk pejalan kaki yang tidak boleh difungsikan menjadi tempat berjualan.

DPRD Depok akan Usut Kasus Kuburan Beras Banpres di Sukma Jaya

DEPOK (IM) - DPRD Kota Depok berencana membentuk tim investigasi sehubungan dengan penemuan beras bantuan Presiden (Banpres) yang terkubur dan membusuk di lahan kosong Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi mengatakan pihaknya akan berupaya mengungkap kasus temuan beras banpres yang terkubur itu. Apakah beras itu buat masyarakat Kota Depok atau sebaliknya. "Investigasi perlu agar tidak timbul spekulasi di masyarakat," ucap Babai, Rabu (3/8).

Diharapkan tim bentukan DPRD itu dapat menemui titik terang kasus tersebut. Karena belakangan ini banyak anggapan bahwa beras banpres tersebut diperuntukkan bagi warga Kota Depok.

"Kita akan membentuk tim investigasi biar terang kasusnya," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok itu menegaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi. Dengan

demikian, sambungnya, kasus tersebut akan jelas diketahui masyarakat bahwa beras banpres tersebut memang bukan untuk warga Kota Depok dan (Pemkot) pun tidak disalahkan masyarakat.

"Saya akan meminta Pemkot bisa menjelaskan masalah ini sebab jangan nanti masyarakat Kota Depok dikira ada kaitan dengan Kota Depok," tegasnya.

Menurut Babai, penjelasan terbuka pada masyarakat sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat tahu kebenaran perihal peruntukkan beras banpres tersebut. "Tentu kita akan memanggil pemerintah daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk kita bicarakan hal ini dan kita bicarakan dengan jajaran Polres dan Kodim Kota Depok untuk duduk bareng menjelaskan pada masyarakat bahwa barang yang ditumbuk oleh PT JNE itu bukan untuk warga Kota Depok tapi untuk masyarakat luar Kota Depok," ungkapnya.

Ketua Fraksi PKB-PSI Kota Depok itu menambahkan, pihaknya sangat mendukung terungkapnya kasus ini. Dikatakannya lagi, temuan

beras banpres tersebut dirasa sangat menyakitkan hati rakyat terutama yang terdampak covid-19.

"Ini sangat menyakitkan masyarakat Indonesia bukan hanya Kota Depok. Di tengah masyarakat menderita sulit mendapatkan ekonomi, keuangan dan sembako karena engga punya uang akibat dari virus korona dimana mereka makan juga harus diperhatikan. Negara hadir disana dengan memberikan bansos tersebut, tapi ada lembaga yang menghilangkan yang mungkin dengan sengaja atau tidak. Tapi ini sangat menyakitkan masyarakat Indonesia khususnya yang tidak mampu dan membutuhkan," paparnya.

Babai mengaku sangat kaget dan menyayangkan dengan adanya temuan tersebut. Sebab menurutnya, beras banpres seharusnya bisa sampai ke masyarakat tidak mampu yang terkena imbas covid-19.

Sebagai wakil rakyat, Babai pun mendesak kasusnya diurus tuntas. "Harus diurus sampai ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya sehingga masyarakat jelas. Karena saat itu banpres sangat dibutuhkan masyarakat, lalu kenapa terjadi seperti itu (pemandaman)," pungkas Babai. ● yan



UNJUK RASA WALHI DI KEDUBES JEPANG

Sejumlah aktivis lingkungan hidup Walhi berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Rabu (3/8). Mereka menyampaikan protes terhadap Jepang karena mempromosikan gas fosil dan hidrogen yang dianggap solusi palsu dalam mengatasi krisis iklim.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILAN PT SUKACITA TEKNOLOGI INDONESIA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atau sebagian dari atau seluruh saham-saham milik PT SUKACITA TEKNOLOGI INDONESIA ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT SUKACITA TEKNOLOGI INDONESIA
Jl. Pangsang No 5 A&B TOWER Unit 11 A Blok L Kebon Jeruk - Kebon Jeruk Jakarta Barat
Jakarta, 04 Agustus 2022
Direksi
PT SUKACITA TEKNOLOGI INDONESIA